

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Isu keamanan data pengguna dalam dunia maya, merupakan hal penting terkait privasi dan keamanan baik individu maupun kelompok. Perkembangan internet menyebabkan batas-batas antara privasi dan publik menjadi luntur, seperti identitas, konten pengguna, dan hal-hal privasi lainnya. Tentunya banyak hal ini menjadi permasalahan keamanan yang penting terutama bagi individu penting bahkan masyarakat dalam suatu negara, dengan adanya media sosial dan perkembangan internet negara perlu melakukan proteksi atau filter guna melindungi segenap warga negaranya.

TikTok merupakan salah satu media sosial berbasis video pendek yang memiliki pengguna aktif lebih dari 80.000 orang dan diunduh lebih dari 2 miliar kali<sup>1</sup>. Sebagai salah satu media sosial yang aktif memberikan akses data pengguna melalui layanan internet, TikTok sebagai platform yang cukup penting dalam memberikan akses dan penyimpanan data pengguna. ByteDance selaku pemilik dan pengelola TikTok yang berbasis di Beijing mendapatkan akses data pengguna dari seluruh dunia, dan menjadi perusahaan teknologi dengan keuntungan yang besar dan sangat penting bagi Tiongkok dengan pendapatan lebih dari 7 Juta Dollar US pada tahun 2018<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Australian Strategic Policy Institute. "Mapping more of China's tech giants: AI and surveillance |ASPI." *Australian Strategic Policy Institute*. November 28, 2019. <https://www.aspi.org.au/report/mapping-more-chinas-tech-giants> (accessed April 21, 2021).

<sup>2</sup> CBinsights. *The Complete List Of Unicorn Companies*. April 2021. <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies> (accessed March 21, 2021).

Selama perkembangannya, TikTok menghadapi banyak masalah terkait akses data pengguna data tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya kasus pembatasan akses terhadap berbagai berita tentang Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok, Pemerintah India sudah memblokir TikTok pada tahun 2020 dikarenakan mengganggu kedaulatan, dan pertahanan negara<sup>3</sup>. Tidak hanya itu, kasus-kasus seperti rasisme dan diskriminasi kerap kali menjadi ancaman bagi individu dikarenakan mudahnya akses ruang publik melalui platform media sosial TikTok.

Amerika Serikat, memiliki industri teknologi yang tersebar diberbagai lini, baik militer, publik bahkan sosial media, dengan adanya persaingan teknologi dalam industri teknologi ini, Amerika Serikat memberikan ruang yang luas dan menciptakan wadah bagi aplikasi-aplikasi yang dibangun dengan infrastruktur teknologi mereka seperti Android dari Google, dan IOS dari Apple. Dengan adanya wadah aplikasi yang berdasarkan infrastruktur ini maka ada banyak persaingan untuk merebut pasar penggunanya, aplikasi TikTok bersaing dengan social media lain seperti Instagram, Facebook, dan Twitter.<sup>4</sup>

Pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat memiliki kekhawatiran terhadap perkembangan teknologi yang berasal dari Tiongkok, hal ini menyebabkan terjadinya perang ekonomi dan teknologi yang menyebabkan adanya saling serang dalam bidang ekonomi, dan teknologi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Australian Strategic Policy Institute. "Mapping more of China's tech giants: AI and surveillance |ASPI." *Australian Strategic Policy Institute*. November 28, 2019. <https://www.aspi.org.au/report/mapping-more-chinas-tech-giants> (accessed April 21, 2021).

<sup>4</sup> David Wu, "WeChat and Tiktok Bans and Their Implications for Future U.S.-China Relations," *Cornell SC Johnson College of Business*, accessed April 8, 2022, <https://business.cornell.edu/hub/2021/04/13/wechat-tiktok-bans-their-implications-future-u-s-china-relations/>.

<sup>5</sup>Hosain, Md Sajjad. "Huawei ban in the US: Projected Consequences for international trade." *International Journal of Commerce and Economics*, 2019: 22.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan pengguna TikTok lebih dari 100 ribu orang dan menjadi salah satu pengguna terbesar dari sosial media ini<sup>6</sup>. Dengan banyaknya pengguna dengan rentang pengguna di semua umur, informasi terkait data pengguna menjadi perhatian bagi pemerintah Amerika Serikat, terutama perihal indikasi kebocoran data pengguna yang disalurkan kepada pemerintah Tiongkok sebagai tindakan spionase melalui aplikasi TikTok. Dan melalui administrasinya Pemerintah Amerika Serikat memberi waktu 45 hari kepada ByteDance untuk mencabut aplikasinya dari layanan App Store<sup>7</sup>.

Pada kasus ini, ByteDance selaku perusahaan pemilik, memberikan bantahan terkait tuduhan bahwa aplikasi TikTok melakukan pengumpulan data dan memberikan data tersebut kepada pemerintah Tiongkok guna memberikan informasi terkait keberadaan orang-orang penting, baik pejabat federal atau identitas masyarakat sipil Amerika Serikat<sup>8</sup>. Setelah itu melalui Eksekutif Trump, ByteDance diberi prasyarat untuk menjual sebagian asetnya terkhusus di wilayah Amerika Serikat dengan perusahaan pihak ketiga yang sejenis yakni Oracle yang mengajukan diri untuk membeli dan mengawasi arus data aplikasi TikTok agar tidak bocor ke pemerintah Tiongkok. ByteDance kemudian menerima prasyarat ini, dengan menjual 25% sahamnya dan membangun fasilitas penyimpanan data khusus bagi aplikasi TikTok di Amerika Serikat<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> BBC. *TikTok threatens legal action against Trump US ban* - BBC News. Agustus 07, 2020. <https://www.bbc.com/news/business-53660860> (accessed April 04, 2021).

<sup>7</sup> Allyn, Bobby. *Trump Signs Executive Order That Will Effectively Ban Use Of TikTok In the U.S.* npr.org. Agustus 06, 2020. <https://www.npr.org/2020/08/06/900019185/trump-signs-executive-order-that-will-effectively-ban-use-of-tiktok-in-the-u-s> (accessed April 06, 2021).

<sup>8</sup> . Allyn, Bobby

<sup>9</sup> Allyn, Bobby.

Sebelumnya Amerika Serikat melarang Huawei dalam melakukan perdagangan dengan afiliasi teknologi asal Amerika Serikat seperti Google yang berasal dari Amerika Serikat, dengan adanya pelarangan ini, maka Huawei sebagai produsen perangkat keras dihadapkan pada isu pencurian IP dan penanaman aplikasi berbahaya didalam perangkat kerasnya. Klaim Amerika Serikat tersebut cukup berat karena selama perkembangannya Huawei tidak pernah diawasi oleh pemerintah Amerika Serikat namun perkembangannya didukung oleh Pemerintah asalnya yakni Tiongkok.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, Huawei tidak diam saja, dengan mengajukan banding pada pemerintah Amerika Serikat, namun gagal memenuhi bukti adanya penggunaan aplikasi berbahaya dan pencurian protokol IP melalui perangkat kerasnya.<sup>11</sup> Huawei berjuang dengan keras untuk mencegah pelarangan kerjasama dengan perusahaan aplikasi lainnya namun perjalanan ini tidaklah mudah karena Huawei terafiliasi sebagai salah satu raksasa teknologi dari Tiongkok yang memiliki pasar pengguna yang luas dan mampu bersaing dengan raksasa teknologi lainnya di Amerika Serikat seperti Samsung, dan Apple.<sup>12</sup>

Kemudian, Pemerintah Amerika Serikat melarang Wechat sebagai salah satu layanan komunikasi karena terindikasi memberikan data komunikasi yang terenkripsi untuk diberikan kepada pemerintah Tiongkok untuk mengontrol jalur komunikasi pengguna, membuka privasi, penyebaran berita palsu dan sensor terhadap berita-berita krisis dari negara Tiongkok.<sup>13</sup> Dalam hal ini Tencet selaku

---

<sup>10</sup> Hosain, Md Sajjad. "Huawei ban in the US: Projected Consequences for international trade."

<sup>11</sup> Md Sajjad Hosain, "Huawei Ban in the US: Projected Consequences for International Trade," *International Journal of Commerce and Economics* 1, no. 2 (2019): 1-4.

<sup>12</sup> Scott Brown, "The Huawei Ban: Everything You Need to Know - Android Authority," Android Authority, 2021, <https://www.androidauthority.com/huawei-google-android-ban-988382/>.

<sup>13</sup> Brown.

pengembang aplikasi diberi sanksi melalui pengadilan Amerika Serikat namun dalam persidangan berikutnya Tencent berhasil memenangkan persidangan dan mencegah pemblokiran Wechat namun tetap menjalani pengawasan dari pemerintah Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Secara umum pembuatan kebijakan dibuat untuk memenuhi sebuah kepentingan yang krusial, dengan melakukan pemblokiran terhadap berbagai aplikasi yang dianggap sebagai ancaman diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengambilan data informasi pengguna yang bisa saja digunakan oleh berbagai pihak untuk kejahatan bahkan menimbulkan kerugian bagi instansi maupun personal.

Dengan adanya prasyarat ini dan ada beberapa kelonggaran yang dilakukan oleh ByteDance selaku perusahaan pengembang aplikasi terhadap tuduhan melalui perintah eksekutif oleh pemerintah Amerika Serikat, walaupun pada akhirnya tidak terbukti namun kasus pengawasan terhadap arus data aplikasi TikTok masih dijalankan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan TikTok sebagai salah satu aplikasi media sosial di dunia, memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat untuk saling berkomunikasi dan membuat konten berbasis video pendek. Dalam perkembangannya terdapat masalah internal terkait hubungan ByteDance sebagai perusahaan pengembang TikTok yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok dan terindikasi telah melakukan berbagai macam ancaman siber atau *Cyber Threat* terhadap Amerika Serikat.

---

<sup>14</sup> Wu, "WeChat and Tiktok Bans and Their Implications for Future U.S.-China Relations."

Oleh sebab itu Amerika Serikat melakukan pelarangan terhadap aplikasi TikTok, melalui Administrasi Trump pada saat itu. Dengan adanya pelarangan ini, maka TikTok tidak dapat memasarkan aplikasinya lagi melalui apps store seperti Google Apps Store dan AppStore Apple di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat.

Bytedance selaku perusahaan pengembang TikTok melakukan usaha agar pelarangan ini dicabut atau dilonggarkan, dengan cara menerima prasyarat untuk menjual sebagian asetnya kepada salah satu perusahaan asal Amerika Serikat yakni Oracle<sup>15</sup>. Dengan begitu maka arus data dan penyimpanan data pengguna Amerika Serikat yang digunakan oleh aplikasi TikTok dapat dimonitori dan disimpan hanya di wilayah Amerika Serikat saja sehingga indikasi kebocoran data tidak terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis ingin membahas alasan Amerika Serikat memberikan prasyarat kepada Bytedance dalam kasus pemblokiran TikTok. Karena dalam kasus ini hanya TikTok saja yang diberikan prasyarat ketimbang produk Tiongkok lainnya yang sudah diblokir seperti Wechat dan Huawei.

### **1.3.Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini ingin menjawab pertanyaan :

“Apa Motivasi Amerika Serikat memberikan Prasyarat kepada Bytedance dalam kasus pemblokiran TikTok?”

### **1.4.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa motivasi Amerika Serikat memberikan prasyarat kepada Bytedance atas Pemblokiran TikTok.

---

<sup>15</sup> AlJazeera. *ByteDance picks Oracle as partner to try to save TikTok US*. September 14, 2020. <https://www.aljazeera.com/economy/2020/9/14/bytedance-picks-oracle-as-partner-to-try-to-save-tiktok-us> (accessed April 17, 2021).

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai acuan dan rekomendasi bagi aktor baik negara maupun aktor non negara dalam mempertimbangkan kebijakan yang tepat melalui teori pembuatan kebijakan poliheuristik.

2. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan data bagi Ilmu Hubungan Internasional terkait pembuatan kebijakan, dan keamanan siber.

### **1.6. Studi Pustaka**

Studi pustaka yang pertama Huawei ban in the US: Projected consequences for international trade oleh Md Sajjad Hosen<sup>16</sup>, dalam jurnal International Journal of Commerce and Economics, dalam artikel ini dijelaskan pelarangan produk Huawei di Amerika Serikat terhadap keamanan data milik Amerika Serikat, produk-produk Huawei dianggap sebagai bagian dari usaha mata-matai melalui perangkat keras, dengan adanya pelarangan ini konsekuensi terhadap kedua belah pihak. Huawei sebagai produsen teknologi smartphone tidak mampu menjangkau pasar Amerika Serikat seperti dahulu, diikuti dengan kesulitannya terhadap sumber daya mentah dari Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat mengalami kesulitan terhadap konsumennya yang menginginkan inovasi dan perkembangan teknologi.

---

<sup>16</sup> Hosain, Md Sajjad. "Huawei ban in the US: Projected Consequences for international trade." *International Journal of Commerce and Economics*, 2019: 22.

Huawei sebagai salah satu perusahaan pengembang teknologi yang berpusat di Shenzhen, dikhawatirkan oleh beberapa negara berafiliasi langsung dengan pemerintah Tiongkok sehingga muncul sentiment bahwa Huawei sebagai perusahaan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Tiongkok dan mengancam keamanan melalui teknologi siber berupa mata-mata, pencurian identitas, bahkan merusak perangkat dengan melakukan peretasan.<sup>17</sup> Sebagai respon, Huawei pada akhirnya berusaha mengalah dan akhirnya memilih untuk tidak memperpanjang masalah dan mencabut produknya dan memutus hubungan dengan Google sebagai salah satu penyedia sistem operasi yang banyak digunakan saat ini, dan mengembangkan sistem operasi barunya.<sup>18</sup>

Pelarangan Huawei ini memiliki beberapa konsekuensi dan kemungkinan terhadap masa depan Huawei maupun kebijakan itu sendiri yakni :

1. Pelarangan dicabut.

Jika dalam usaha pelarangan Huawei berdampak langsung terhadap perdagangan Tiongkok maka Tiongkok juga tidak akan tinggal diam dan akan melakukan hal yang sama yakni pelarangan produk teknologi lain yang berafiliasi dengan Amerika Serikat, hal ini bisa membuat pelarangan ini diringankan atau bahkan dicabut jika masing-masing actor merasakan dampak yang signifikan.

2. Pelarangan dilanjutkan.

Pelarangan dilanjutkan dan dalam waktu yang cukup lama akan berdampak pada Huawei sebagai produsen, setelah melepas kontrak penggunaan system operasi berbasis Android dari Google, Huawei akhirnya

---

<sup>17</sup> Hosain, Md Sajjad.

<sup>18</sup> Hosain, Md Sajjad.

menciptakan system operasinya sendiri dan system operasi ini akan memulai ulang wajah baru produk-produk Huawei yang sudah banyak dikenal konsumen. Dengan berubahnya wajah baru dari system operasinya tentu berdampak pada pasar, perlahan Huawei bisa saja mendapatkan kembali pasarnya dan menjadi penantang baru bagi industri teknologi, hal ini juga menjadi salah satu dampak dan mengancam industri teknologi Amerika Serikat dan memperuncing konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Studi Pustaka yang kedua, *Virtual Strike : Ban of 59 Chinese Apps in India and Users and Non-Users Perceptions* oleh Veena Shenoy dan Sheetal Mahender,<sup>19</sup> jurnal yang dirilis dalam jurnal *High Technology Letters* ini menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pelarangan aplikasi yang berasal dari Tiongkok dan pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan kedepannya terhadap pelarangan dan hubungan bilateral kedua negara.

Indikasi terhadap adanya upaya pengumpulan data pribadi melalui aplikasi yang berasal dari developer aplikasi asal Tiongkok, menjadi alasan utama Pemerintah India melakukan pelarangan terhadap aplikasi tersebut termasuk TikTok, hal ini diupayakan selain menjaga data pribadi pengguna warga negara India juga ikut mengkampanyekan aplikasi lokal sejenis.<sup>20</sup> Tetapi hal ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan India lainnya dengan Tiongkok.

Berdasarkan data pada artikel ini, Masyarakat India tidak terlalu merasakan dampaknya, walaupun terdapat sentimen tertentu terkait Tiongkok melalui media

---

<sup>19</sup> Veena Shenoy, Sheetal Mahendher. "Virtual Strike: Ban of 59 Chinese Apps in India and Users and Non-Users Perceptions." *High Technology Letters*, 2020: 841-848

<sup>20</sup> Veena Shenoy

sosial, baik pengguna maupun non-pengguna merasa kebijakan ini tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan ekonomi dan keamanan masyarakat India.<sup>21</sup> Justru dengan berkembangnya aplikasi dari developer Tiongkok menunjukkan kurangnya ketertarikan terhadap aplikasi lokal sejenis dan kurangnya perkembangan aplikasi lokal sejenis dalam menarik pasar masyarakat.

Studi Pustaka Ketiga, berjudul *Cybersecurity in Sino-American Relations* oleh Marie Baezner.<sup>22</sup> Artikel ini memberikan penjelasan secara kronologis tentang hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam masalah cybersecurity. Sebelum 2015 tingkat kejahatan siber terhadap Amerika banyak di dominasi serangan dari Tiongkok yang mengakibatkan sentiment negative terhadap Tiongkok terutama serangan-serangan siber ini menyerang perihal-perihal krusial seperti data keamanan orang-orang penting, proyek militer dan arsip-arsip rahasia, setelah 2015 Amerika Serikat dan Tiongkok membuat perjanjian untuk mengurangi dan berbagi informasi terhadap serangan siber yang dilakukan oleh actor non negara yang berada dalam yurisdiksi masing-masing, memang dalam kenyataanya serangan siber yang dilakukan oleh dan atas nama negara menurun drastis dari masing-masing negara memang berkurang tetapi yang terjadi adalah upaya kejahatan siber ini menggunakan jalur yang berbeda baik melalui akses dari negara lain atau melalui malware yang muncul bukan dari Amerika Serikat maupun Tiongkok.<sup>23</sup>

Studi Pustaka Keempat, yakni berjudul “TikTok and WeChat Curating and controlling global information flows” oleh Fergus Ryan, Audrey Fritz and Daria

---

<sup>21</sup> Veena Shenoy

<sup>22</sup> Baezner, Marie. "Cybersecurity in Sino-American Relations." *CSS Analyses in Security Policy*, April -, 2018:1.

<sup>23</sup> Marie Baezner.

Impiombato. Laporan Jurnal ini berfokus pada pembahasan tentang seluk beluk TikTok dan Pemerintah Tiongkok terkait pengembangan dan relasinya dengan politik dan ekonomi baik domestik dan Luar Negeri.<sup>24</sup>

Sebagian besar media sosial di dunia memiliki kemampuan untuk menghubungkan individu dengan individu lainnya atau kelompok individu tanpa adanya batasannya. TikTok dan Wechat sebagai aplikasi media sosial yang berkembang pesat di dunia menjadikan Bytedance dengan TikTok dan Tencent dengan Wechat dalam pengawasan Pemerintah Tiongkok, hal ini memberikan kekhawatiran kepada beberapa negara terutama negara-negara Barat akan ancaman perlindungan data dan disinformasi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tersebut.

Terlepas dari adanya pengawasan Pemerintah Tiongkok, beberapa negara juga melakukan hal yang serupa dengan aplikasi tersebut, hal ini dilakukan dengan berbagai macam alasan seperti pelarangan konten seksual dan ujaran kebencian. Dengan algoritma dan proses pengumpulan data hal ini sangat mudah dilakukan terutama dengan menggunakan robot kecerdasan buatan.<sup>25</sup>

Studi Pustaka kelima. berupa jurnal berjudul ” *European policies towards Chinese tech companies: European interests, security risks and policy recommendations*” oleh Jufang Wang dan Denis Galligan. Jurnal ini membahas lebih dalam berbagai kebijakan Negara-Negara Uni Eropa terhadap aplikasi dari

---

<sup>24</sup> Fergus Ryan, Audrey Fritz, and Daria Impiombato, “TikTok and WeChat Information Flows,” *ASPI International Cyber Policy Centre*, 2020, <https://www.aspi.org.au/report/tiktok-wechat>.

<sup>25</sup> Ryan, Fritz, and Impiombato.

Tiongkok dan perang teknologi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok.<sup>26</sup>

Negara-negara Eropa mengalami dampak signifikan dari perkembangan teknologi baik dari Amerika Serikat maupun Tiongkok, kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa berfokus pada standarisasi dan penyeimbang diantara keduanya. Dalam hal pelarangan TikTok, Uni Eropa melakukan koordinasi dalam pengawasan terhadap konten dengan bekerjasama langsung dengan pengembang sebagai salah satu upaya pengembangan teknologi di negara-negara Uni Eropa secara domestik. Selain itu dengan mempertimbangkan resiko akan adanya teknologi dari Tiongkok, Uni Eropa diharapkan melakukan pengamanan secara spesifik seperti militer dan ekonomi, serta melakukan standarisasi terhadap arus data dan pengembangan teknologi bersama perusahaan dari Tiongkok.<sup>27</sup>

## 1.7. Kerangka Konseptual

### 1.7.1. Teori Poliheuristik

Poliheuristik merupakan pendekatan alternatif dari utilitas harapan dalam teori pilihan dan model pilihan rasional analitis lainnya, secara terminologi poliheuristik berdasarkan dua kata yakni *Poly* (banyak) dan *Heuristic* (Jalan Pintas), artinya menunjukkan adanya mekanisme dalam membentuk jalan pintas atau mempercepat dan menyederhanakan pembuatan kebijakan luar negeri yang kompleks.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Denis Galligan and Jufang Wang, "European Policies towards Chinese Tech Companies : European Interests , Security Risks and Policy Recommendations," 2021, [https://www.researchgate.net/publication/356360337\\_European\\_policies\\_towards\\_Chinese\\_tech\\_companies\\_European\\_interests\\_security\\_risks\\_and\\_policy\\_recommendations](https://www.researchgate.net/publication/356360337_European_policies_towards_Chinese_tech_companies_European_interests_security_risks_and_policy_recommendations).

<sup>27</sup> Galligan and Wang.

<sup>28</sup> Xinsheng Liu, "The Poliheuristic Theory of Decision and the Cybernetic Theory of Decision: A Comparative Examination," in *Integrating Cognitive and Rational Theories of Foreign Policy Decision Making* (Palgrave Macmillan US, 2003), 139–57, [https://doi.org/10.1007/978-1-137-07848-3\\_8](https://doi.org/10.1007/978-1-137-07848-3_8).

Dalam pembuatan kebijakan, menjalankan dua jalur proses pembuatan kebijakan yakni<sup>29</sup> :

- a. Mengeliminasi alternatif yang tidak dapat dibuat dalam dimensi dan situasi yang krisis.
- b. Memilih alternatif yang mendekati berdasarkan alternatif tersisa sehingga mampu memaksimalkan keuntungan dan mengurangi resiko.

Poliheuristik mampu mengidentifikasi proses yang dilakukan oleh pemimpin untuk membuat kebijakan yang kompleks menjadi keputusan sederhana dengan berfokus pada dimensi keputusan tersebut, dengan mengeliminasi alternatif menggunakan proses analisis dan kumpulan alternatif yang sudah dieliminasi menjadi ukuran yang bisa diatur dengan menjalankan analisa keputusan yang tidak bisa diganti. Dalam hal ini kita bisa secara langsung melihat keputusan berasal dari aktor rasional atau politik birokratik.

Guna menjalankan teori ini, dimensi yang harus diperhatikan adalah<sup>30</sup> :

1. Nonholistik/ Pencarian yang tidak menyeluruh.
2. Proses berdasarkan dimensi.
3. Pembuatan keputusan yang tidak bisa diganti
4. Proses untuk memuaskan.
5. Sensitifitas lainnya.

Untuk melihat gagasan awal dimensi dari pembuatan keputusan alternatif ini kita harus melihat lebih dekat aspek dimensi keputusan tersebut, seperti

---

<sup>29</sup> Alex Mintz, Steven B. Redd, and Eldad Tal-Shir, "The Poliheuristic Theory of Political Decision-Making," in *Oxford Research Encyclopedia of Politics* (Oxford University Press, 2017), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.302>.

<sup>30</sup> Raymond Dacey and Lisa J. Carlson, "Traditional Decision Analysis and the Poliheuristic Theory of Foreign Policy Decision Making," *Journal of Conflict Resolution* 48, no. 1 (February 1, 2004): 38–55, <https://doi.org/10.1177/0022002703261053>.

diplomasi, ekonomi, militer dan aspek politik nasional, internasional, maupun dimensi kebijakan lain. Secara tidak langsung dimensi ini membentuk konsep atribut dalam menjalankan pembuatan keputusan.<sup>31</sup>. Sehingga dalam membentuk kebijakan akan ada aspek ruang dan atribut dari setiap bagian yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Berdasarkan 5 point diatas penggunaan poliheuristik dalam pembuatan kebijakan berdasarkan pencarian secara tidak menyeluruh dalam membandingkan kebijakan dan opsi yang sangat terikat terhadap kumpulan alternatif dan kumpulan atribut, kemudian setelah menemukan alternatif, maka yang dilakukan setelahnya adalah mengeliminasi alternatif yang tidak memenuhi kriteria yang paling penting dalam dimensi tersebut, proses berikutnya adalah proses yang tidak bisa diganti artinya alternatif tersebut tidak ada efeknya terhadap dimensi lain ketika ia diganti dengan alternatif lainnya, dalam proses memuaskan maka yang dicari adalah alternatif yang cukup diterima daripada memaksimalkan alternatif karena tidak memungkinkan untuk memenuhi kriteria dimensi lain, dan terakhir sensitifitas lain yang mengikuti lingkungan dimensi dalam prosesnya (politik, diplomasi, militer, dan ekonomi).<sup>32</sup>

Menurut Mintz and Geva, poliheuristik memiliki kelebihan dalam menganalisa pembuatan keputusan yakni:<sup>33</sup>

1. Tidak seperti perspektif keputusan lainnya, poliheuristik tidak memiliki asumsi terikat terkait proses pembuatan keputusan yang bersifat rasional

---

<sup>31</sup> Dacey and Carlson.

<sup>32</sup> Dacey and Carlson.

<sup>33</sup> Mintz, Redd, and Tal-Shir, "The Poliheuristic Theory of Political Decision-Making."

berdasarkan teori utilitas maupun terikat secara rasional. Sehingga poliheuristik mampu menganalisa kedua teori tersebut secara empiris.

2. Poliheuristik hanya berpusat pada pembuatan kebijakan luar negeri yang sederhana, cepat dan strategis tanpa melihat secara keseluruhan untuk mencapai sebuah keputusan.
3. Poliheuristik menekankan pada multidimensional dan lingkungan kebijakan luar negeri yang tidak bisa diganti. Dengan mengeliminasi alternatif yang jauh dari batasan level domestik, dan tidak adanya tukar menukar keuntungan antar dimensi sehingga mengurangi resiko dalam dimensi politik domestik.
4. Poliheuristik memberikan cara baru dalam pembuatan kebijakan luar negeri, melalui dua fase proses, yakni mengeliminasi pilihan alternatif yang paling memungkinkan melalui dimensi yang berbeda dan memilih alternatif yang paling mungkin untuk digunakan, kemudian fase berikutnya adalah memaksimalkan kumpulan alternatif tersebut untuk keberhasilan alternatif lainnya.
5. Poliheuristik menunjukkan pemimpin individu akan memiliki banyak sekali strategi dan menggunakan 2 fase pemilihan kebijakan ini berdasarkan dimensi dan lingkungannya, secara spesifik dengan cara melihat informasi secara nonholistik, dimensi yang sesuai dengan pilihan, mengeliminasi alternatif yang tidak bisa diganti, memuaskan prinsip dan sensitifitas lainnya, dengan begitu maka pembuat kebijakan memiliki gambaran dan memilih alternatif prosedur yang berdasarkan alternatif tersebut dan mencari strategi pengganti yang dapat memaksimalkan keuntungan.

6. Poliheuristik beranggapan bahwa strategi keputusan dan aturan tidak selalu terikat dan akan terus berganti setiap waktu dan akan mempengaruhi hasil pilihan utama.

## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, Penelitian Kualitatif yang dipakai adalah penelitian yang bersifat Eksplanatif dan menggunakan Logika Berfikir dalam usaha memecahkan masalah penelitian,<sup>34</sup> metode ini bekerja dengan mengumpulkan data berupa jurnal ilmiah yang berisikan penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu terkait Bytedance dan TikTok, Usaha pelarangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait Keamanan Cyber, dan lain sebagainya. Data-Data tersebut dikumpulkan untuk digunakan sebagai bagian dan alat analisis untuk mengetahui Motivasi dan strategi yang menjadi landasan Amerika Serikat memberikan Prasyarat kepada Bytedance dalam kasus pelarangan TikTok.

Jenis Penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis Motivasi Amerika Serikat memberikan Prasyarat kepada Bytedance dalam kasus pemblokiran TikTok adalah jenis penelitian yang bersifat eksplanatif<sup>35</sup>. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melihat keterkaitan antara teori, konsep, dan hipotesis dengan fenomena yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dan anomali dalam penelitian.

---

<sup>34</sup> Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pusat antar Universitas Studi Politik Universitas Gadjah Mada, 1990.

<sup>35</sup> Mas'oed, Mohtar

### 1.8.2. Batasan Penelitian

Batasan waktu yang digunakan penulis untuk penelitian yang berjudul Motivasi Pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan prasyarat kepada Bytedance atas pemblokiran TikTok adalah dari tahun 2020-2021 dimulai dari adanya pengajuan pemblokiran oleh pemerintah Amerika Serikat terkhusus pada masa rezim pemerintahan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, hingga dicabutnya perintah eksekutif yang diikuti oleh bergantinya Presiden Amerika Serikat yang baru yakni Joe Biden.

### 1.8.3. Unit Analisa

Variabel dependen atau Unit analisa adalah objek yang akan dijelaskan dalam sebuah penelitian. Sedangkan variabel independen atau Unit eksplanasi adalah unit penjelas dari unit yang dianalisa.<sup>36</sup> Berdasarkan penelitian yang berjudul “Motivasi Amerika Serikat memberikan Prasyarat kepada Bytedance dalam kasus pemblokiran TikTok” maka unit analisisnya adalah Amerika Serikat, sedangkan unit eksplanasinya adalah Bytedance selaku pengembang Aplikasi TikTok.

### 1.8.4. Tingkat Analisa

Tingkat Analisa adalah Tingkatan dalam penelitian yang digunakan untuk menganalisa masing-masing unit.<sup>37</sup> Secara umum, tingkat analisa ada 3 yakni individu, negara dan sistem Internasional. Dalam penelitian yang berjudul “Motivasi Amerika Serikat memberikan Prasyarat kepada Bytedance dalam kasus pemblokiran TikTok”, tingkat analisisnya adalah Negara.

---

<sup>36</sup> Mas'oeed, Mohtar(92)

<sup>37</sup> Mohtar Mas'oeed

#### 1.8.5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dengan mempelajari, serta membandingkan beberapa data berupa buku, jurnal, karya ilmiah lainnya yang didapat dari sumber-sumber tertentu seperti pustaka dan sumber media online.<sup>38</sup> Data yang diperoleh akan digunakan sebagai rujukan penelitian adalah data sekunder.

Data sekunder didapatkan melalui berbagai laporan website resmi dan artikel yang berkaitan, dengan kata kunci TikTok, Bytedance, Ban TikTok, dan TikTok Ban Policy. Untuk mengetahui kronologi dan situasi yang berkaitan dengan pelarangan TikTok serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Bytedance selaku pemilik perusahaan. Data lainnya didapatkan dari berbagai tulisan, buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, situs berita internasional, dan tulisan ilmiah lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

#### 1.8.6. Teknik analisa

Teknik analisa dilakukan agar penjelasan penelitian ini lebih sistematis. Menurut Barbara D Kawulich,<sup>39</sup> ada 5 tahapan dalam teknik analisa yakni :

##### a. Narasi

Pendekatan ini merupakan teknik dalam mengidentifikasi permasalahan dengan menggunakan data-data yang berhubungan dengan konflik atau anomali. Dalam hal ini konflik yang muncul antara Bytedance sebagai perusahaan pemilik TikTok dengan pemerintah Amerika Serikat, sedangkan

---

<sup>38</sup> , Mohtar Mas'oe'd,(90)

<sup>39</sup> Kawulich, Barbara. " Data Analysis Techniques in Qualitative Research." *Journal of Research in Education*, 2004: 96-113.

anomalnya adalah Amerika Serikat memberikan Prasyarat kepada Bytedance tidak seperti Huawei dan Wechat yang tidak diberi prasyarat atas kasus pemblokirannya.

b. Koding

Adalah teknik yang digunakan dengan mengorganisasi data-data yang ada dalam studi pustaka yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menentukan data yang sesuai dengan topik penelitian, yakni motivasi Pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan prasyarat kepada Bytedance atas pemblokiran TikTok.

c. Interpretasi

Adalah teknik yang akan membantu penulis untuk memahami masalah berdasarkan data dengan menggunakan kerangka konseptual berupa Rational Choice.

d. Konfirmasi

Adalah tahapan penulis menemukan bukti-bukti yang menunjukkan klaim berdasarkan data yang ditemukan didalam konflik antara Amerika Serikat dan Bytedance dalam pemblokiran TikTok, sehingga Pemerintah Amerika Serikat mau memberikan prasyarat kepada Bytedance atas pemblokiran TikTok.

e. Presentasi

Adalah tahapan penulis untuk melakukan presentasi atas penemuan yang didapatkan berupa motivasi Pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan prasyarat kepada Bytedance atas pemblokiran TikTok.

## 1.9.Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Pengantar, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sebagai bahan rujukan dan pembandingan, kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis penelitian, metode penelitian, unit analisa, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa.

### BAB II Bytedance Dan Tiktok Dalam Pusaran Perang Dagang Amerika Serikat Dan Tiongkok

Bab ini akan menjelaskan mengenai Bytedance, TikTok dan meningkatnya tensi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang menjadi dasar pembentukan kebijakan pemblokiran TikTok

### BAB III Pelarangan Tiktok Di Amerika Serikat

Bab ini menjelaskan pemblokiran TikTok sebagai aplikasi yang terindikasi telah melakukan pengumpulan data. Dari penandatanganan perintah eksekutif, pra-peradilan dan akhir dari pemblokiran TikTok dengan terjadinya perubahan rezim dan pencabutan perintah eksekutif oleh Presiden Joe Biden..

### BAB IV Analisis Motivasi Pemerintah Amerika Serikat Dalam Memberikan Prasyarat Kepada Bytedance Atas Pemblokiran Tiktok.

Pada bab ini akan menjelaskan motivasi Amerika Serikat memberikan prasyarat yang kepada Bytedance dalam kasus pemblokiran TikTok

dengan menggunakan teori Poliheuristik sesuai data-data yang sudah dijabarkan dari Bab II dan Bab III. Yang yang disoroti adalah motivasi dan pertimbangan Pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan prasyarat kepada Bytedance atas pemblokiran TikTok.

## BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian.



